

**PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE* (COVID-19)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA (HTN)



Disusun Oleh :

AHMAD ZUMAR SYAFIQ
2016-20-021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI *CORONA*
VIRUS DESEASE (COVID-19)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:


AHAMAD ZUMAR SYAFIQ

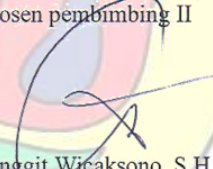
NIM 2016-20-021

Kudus, 05 Februari 2022

Disetujui
Dosen Pembimbing I


Dosen pembimbing II


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum


Anggit Wicaksono, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zumar Syafiq

Nim : 2016-20-021

Alamat : Desa Kutuk RT 01/ RW 01 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Perlindungan Pekerja Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten Kudus Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19)

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini murni atas gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran tentang penelitian saya, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 18 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



(Ahmad Zumar Syafiq)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

ومن لم يبق مر التعلم ساعة, تجرع ذل الجهل طول حياته

“Barang siapa tidak merasakan pahitnya mencari ilmu / belajar sesaat saja, maka dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Bukan Riwayat Hadits)

Kupersembahkan Untuk :

1. Allah Subhanahu Wataala yang selalu melimpahkan kenikmatan, kesehatan, serta kemudahan dalam berfikir sehingga tercapai tahap ahir dalam perkuliahan.
2. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Umatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Ayah dan Ibu yang selalu merawat, mendidik, serta mendoakan serta selalu memberikan suport terhadap proses anaknya dalam menjalankan pendidikan;
4. Bapak / Ibu Dosen yang senantiasa membimbing dalam perkuliahan maupun membimbing dalam penyusunan skripsi

5. Seluruh keluarga besar, hususnya kakak Fatimatuz Zahra S.pd.I yang selalu mengarahkan;
6. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukung selama ini;
7. Almamaterku Pondok Pesantren Putra-Putri Tahfidzul Qur'an Darul Mannar dan Pondok Pesantren Manarul Anwar;
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus.



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)** bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja terhadap penerapan upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 pada masa pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diambil dan digunakan adalah data primer, dan penulisan skripsi ini merupakan bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja terhadap penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mendasari pada Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Penerapan upah minimum merupakan berfungsi sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak rendah, sehingga dapat melindungi pekerja untuk kelangsungan hidup. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dalam pengawasan upah minimum kabupaten adalah pelaksanaan penangguhan perusahaan yang tidak dapat membayar upah pekerja sesuai dengan UMK tidak dilakukan secara normatif akan tetapi perusahaan dan pekerja melakukan kesepakatan tentang upah secara bipatrid, dan tidak melibatkan Dinsosnakertrans Kudus sebagai unsur pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam hal ini adalah memberi binaan kepada pekerja dan pengusaha untuk mematuhi peraturan secara normatif dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Perlindungan Pekerja, Upah Minimum, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak Skripsi	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSAKA	
A. Perlindungan Pekerja	17
B. Penetapan Upah Minimum Untuk Melindungi Pekerja/Buruh	20
C. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Penentuan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	39
F. Metode Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Pekerja Terhadap Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus Tahun 2021 Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> (Covid-19)	41
B. Kendala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam Pengawasan Upah Minimum di Kabupaten Kudus	68

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIR